

## DAFTAR REFRENSI

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin (2018) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Direktorat Pendidikan, dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian, Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Handrawan, (2019). *Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Media Sahabat Cendekia.
- Hilman Hadikusuma. (2013) *Metode Pembuatan Kertas kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- IGM Nurdjana. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematic Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta.
- Jawade. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi,Pemberantasan, Korupsi. (2015). *Kapita, Seleka dan Beban Biaya, Korupsi*, Jakarta
- Leden Marpaung. (2012). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Martiman Prodjohamidjojo, (2001), *Penerapan Pembuktian Terbalik. Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta
- Monang.(2015). *KPK dan POLRI Bersatulah Memberantas Korupsi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Robert Klitgaard, (2005), *“Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah”*, (alih bahasa oleh Masri Maris), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rodliyah, Salim, (2017), *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok:PT.Raja Grafindo Persada

Roni Wijayanto (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung.

Syamsa. (2008). *Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: KPK.

Tunku Abdul Aziz, (2005) *Fighting Corruption: My Mission*, Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, Setia Karya, Semarang.

Zainal Abidin Farid. (2007). *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika

#### **Jurnal :**

Denny Latumaerissa (2014) Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sasi Vol. 20 No. 1. Bulan Januari-Juni 2014*

Elsy Margaritha. (2023) Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahui Merupakan Rupiah Palsu. *COMSERVA: (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) - Vol. 03 (02) Juni 2023 - (650-656)*

Fazel S dan Wolf A, (2015) "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", *PLoS ONE 10(6): e0130390*. doi:10.1371/journal.pone.0130390, June 18, 2015, hal. 1-8

I Putu Cipta Mahendra Arinda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Kade Richa Mulyawati. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pengurus Lembaga Pekreditan Desa (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus Tpk/2021/Pengadilan Negeri Denpasar) . *Jurnal Preferensi Hukum, 4(1)*, 74-78

Indonesia Corruption Watch, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Usul Inisiatif Masyarakat (edisi Revisi 2015)

M.Syamsudin. Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum. *UNISIA*, Vol. XXX No. 64 Juni 2007.

Prianter Jaya Hairi. Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia. *Negara Hukum: Vol. 9, No. 2, November 2018*

Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana”, *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No.1, Mei 2017, hal. 41-42.*

Setiadi. 2018. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602*

### **Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

